

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, serta cara mendidik. Menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003), Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa arti Pendidikan; “Pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses yang esensial untuk mencapai keseimbangan dan kepuasan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Perbedaan utama antara pendidikan dan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat, selain penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Melalui proses ini, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai agama, budaya, dan intelektual, serta keahlian, kepada generasi mendatang, sehingga mereka benar-benar siap menghadapi masa depan yang lebih cerah bagi bangsa dan negara (Nurkholis, 2013).

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh seluruh provinsi di Indonesia. Secara umum, kemiskinan sering dipandang sekadar sebagai indikator rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal pada kenyataannya kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Indonesia tidak terkecuali, karena negara ini menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi, terutama terkait kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Secara umum, kemiskinan diukur

berdasarkan tingkat pendapatan dan pola pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, serta pendidikan, Hal ini sejalan dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa kebutuhan dasar mencakup pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami gangguan. Berdasarkan pengertian tersebut, kebutuhan material merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang berkaitan dengan aspek *fisiologis*. Apabila seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka ia akan memiliki kesempatan untuk hidup secara layak dan lebih lanjut dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal (Nurhasanah et al., 2023). Menurut Todaro dan Smith (2006) serta Kuncoro (2003), sebagaimana dikutip (Takaredase, 2019) Karakteristik utama kemiskinan mencakup rendahnya kualitas hidup, keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesejahteraan sosial serta kondisi kesehatan yang tidak optimal dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan serta merumuskan kebijakan yang efektif di bidang perlindungan sosial, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Secara umum, ketimpangan dalam masyarakat terutama disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, yang mengakibatkan rendahnya pendapatan dan penghasilan. Dalam arti yang lebih luas, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara memadai guna memastikan kehidupan yang lebih baik. Adapun faktor penyebab kemiskinan yaitu: 1) tingkat pendidikan yang masih rendah; sama halnya dengan makanan, pendidikan juga menjadi kebutuhan pokok dan dasar bagi setiap orang, dengan tingkat pendidikan yang rendah seseorang cenderung kurang memiliki pengetahuan, wawasan, serta keterampilan yang memadai dalam kehidupannya, 2) keterbatasan lapangan pekerjaan; dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari perlu adanya uang untuk membeli kebutuhan hidup, untuk menghasilkan uang seseorang perlu bekerja, dengan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadikan seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tidak menutup kemungkinan seseorang menciptakan

lapangan kerja baru, namun hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat miskin yang kurang mampu, baik dari segi modal juga keterampilan yang dimiliki, 3) beban hidup keluarga; salah satu faktor penyebab kemiskinan yaitu beban hidup keluarga, dimana ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, maka beban hidup seseorang tersebut juga akan bertambah, dengan begitu seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya agar dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin (Gilbert, 2023).

Pada tahun 2007, pemerintah pusat menangani masalah ini dengan meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan tunai bersyarat yang ditujukan bagi keluarga-keluarga yang sangat miskin dan memenuhi persyaratan tertentu terkait pendidikan dan kesehatan. Program ini dilaksanakan di wilayah-wilayah yang dianggap memerlukan bantuan dari program ini dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan program tersebut. Kebijakan program ini digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan BPS (Riani et al., 2022).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*), yakni program jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial (Friska Olabu et al., 2024). Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan sebagai tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (Dulkiah et al., 2018).

Misi besar kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Semua terlihat nyata mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 10,12% pada bulan September 2017 menjadi 9,82% pada bulan Maret 2018 dari total penduduk (Rinnanik et al., 2019). Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dengan melakukan penyempurnaan bisnis Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan target penerima manfaat dan penguatan program komplementer pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) (Cahyadi et al., 2020). Dengan demikian, pemenuhan kewajiban oleh peserta PKH tidak semata pemenuhan kewajiban sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), namun juga karena adanya kesadaran manfaat pendidikan bagi anak dalam keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah Proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memiliki modul utama yaitu modul kesehatan dan gizi, modul pendidikan dan pengasuhan, modul ekonomi, modul perlindungan anak, modul kesejahteraan dan modul *stunting*. Kegiatan ini merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang secara umum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan ekonomi dan pengetahuan seputar hak-hak lansia serta penyandang disabilitas di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Adapun Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kampung Gunung Kokosan Menunjukkan bahwa implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) khususnya pada aspek pendidikan belum berjalan sesuai harapan Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih kurang memahami pentingnya pendidikan anak ditandai dengan rendahnya pengawasan orang tua ketika belajar di rumah, ketidakteraturan kehadiran anak disekolah, serta minimnya penerapan materi modul pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tingkat partisipasi Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) juga bervariasi sehingga penyampaian materi tidak sepenuhnya terserap. Kesenjangan antara tujuan ideal dan kondisi lapangan inilah yang menjadikan penelitian tentang Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Gunung Kokosan menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor pendukung, hambatan, serta meningkatkan kemampuan pengetahuan dan perilaku pendidikan pada keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah melengkapi PKH dengan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) (Wahyudin, 2021).

Implementasi pada dasarnya merujuk pada kegiatan, tindakan, atau keberadaan mekanisme di dalam suatu sistem. Implementasi bukanlah sekadar suatu kegiatan itu sendiri, melainkan upaya yang direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fawaid, 2017). Pada dasarnya implementasi kebijakan ialah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di lapangan belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas penyampaian materi, tingkat partisipasi, dan, yang paling krusial, terjadinya perubahan perilaku nyata pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Beberapa kendala yang sering dihadapi yaitu keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping, metode penyampaian yang kurang variatif dan cenderung satu arah, serta tingginya angka ketidakhadiran atau kurangnya fokus KPM selama sesi berlangsung. Hal ini mengakibatkan *transfer* pengetahuan yang tidak maksimal dan menjadikan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) hanya sebagai formalitas. Belum optimalnya implementasi ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi (Tendean, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu menyoroti Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya menekankan pada peran pendamping, implementasi dalam bantuan

sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang spesifik, yaitu membahas Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Bidang Pendidikan di Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya menjadi ruang edukasi bagi keluarga penerima manfaat masih jarang dibahas secara mendalam. Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti pemenuhan komitmen pendidikan atau peran pendamping dalam monitoring sekolah, sementara proses Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai sarana peningkatan wawasan orang tua tentang hak pendidikan, pola asuh, dan dukungan belajar anak untuk menelaah kualitas materi belum banyak dikaji. Padahal, kualitas pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sangat menentukan keberhasilan keluarga dalam mendampingi pendidikan anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan, sejauh mana keluarga memahami materi yang disampaikan dan sebagai proses pemberdayaan keluarga, bukan sekedar pemenuhan komitmen program.

Di berbagai daerah masih ditemukan permasalahan terkait rendahnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meskipun telah mengikuti kegiatan P2K2. Beberapa keluarga hadir sekadar untuk memenuhi kewajiban tanpa memahami materi dengan serius yang disampaikan. Ada pula keluarga yang masih kurang peduli terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan dan lainnya yang seharusnya menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan hasil nyata di lapangan. Kondisi serupa juga terlihat di Kampung Gunung Kokosan, tempat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan observasi, masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki keterbatasan dalam memahami materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Misalnya, pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan anak masih rendah, terlihat dari masih adanya anak yang jarang hadir di sekolah atau kurang mendapatkan pendampingan belajar dari orang

tua dan sebagainya. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka tercermin dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang membutuhkan partisipasi langsung mereka. Selain itu, peran orang tua dalam lingkungan keluarga juga mendukung proses pembelajaran yang dijalani anak-anak mereka. Khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah, pemerintah, pendidik, dan kelompok masyarakat terkait dapat turut membantu keluarga yang kurang beruntung dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak-anak mereka (Larasati, 2019). Selain itu, kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan rumah tangga masih terbatas, sehingga bantuan yang diterima banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek daripada investasi jangka panjang.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih banyak yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terhadap pengetahuan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam modul pendidikan. Misalnya, pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan anak masih rendah, pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang tentang pendidikan menyebabkan anak tidak semangat sekolah, terlihat dari masih adanya anak yang jarang hadir di sekolah atau kurang mendapatkan pendampingan belajar dari orang tua.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Gunung Kokosan, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH)?”.

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu proses penyediaan fasilitas yang diperlukan guna melaksanakan kegiatan secara efektif hingga tujuan akhir tercapai serta memiliki dampak positif dan negatif. Proses implementasi kebijakan ialah hal yang lebih penting dari seluruh rangkaian proses kebijakan, karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan dalam pelaksanaannya yang melibatkan berbagai variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada Program Keluarga Harapan (PKH), implementasi tercermin melalui proses penyampaian materi pendidikan oleh pendamping dengan menggunakan bahasa sederhana, metode diskusi dan tanya jawab, serta keterlibatan aktif Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam setiap pertemuan, yang didukung oleh ketersediaan sarana, kompetensi pendamping, komitmen dalam memfasilitasi kegiatan, serta pelaksanaan yang mengacu pada prosedur melalui pencatatan kehadiran dan pelaporan kegiatan secara berjenjang sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala.

1.3.2 Pendidikan

Pendidikan adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. Pengetahuan pendidikan adalah informasi, pemahaman, dan keterampilan yang dimiliki individu atau keluarga mengenai pentingnya pendidikan. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pengetahuan pendidikan merujuk pada pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang hak, kewajiban, dan akses terhadap pendidikan formal maupun non-formal bagi anggota keluarganya, serta kesadaran akan peran aktif orang tua dalam mendukung proses belajar anak. Pemahaman ini ditingkatkan melalui penyampaian materi pendidikan dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta melalui diskusi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong perubahan perilaku Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) dalam memperhatikan pendidikan anak, meskipun pemahaman dan penerapan materi masih belum merata pada setiap keluarga.

1.3.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat. Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial dalam bentuk uang tunai, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku melalui kewajiban mengikuti layanan pendidikan serta kegiatan pemberdayaan seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Melalui kegiatan tersebut pelaksanaan program diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap pentingnya pendidikan anak melalui pertemuan rutin, penyampaian materi sesuai modul, serta pemantauan kehadiran dan partisipasi peserta, sehingga program tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kewajiban pendidikan anak meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam partisipasi dan sumber daya pendamping.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan bacaan, referensi penelitian, peningkatan pengetahuan, dan mampu mengembangkan keilmuan pendidikan masyarakat khususnya mengenai Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Gunung Kokosan, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga program dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam pengentasan kemiskinan di daerah.
- 2) Bagi Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), temuan-temuan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan acuan dalam melakukan pengawasan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), sehingga implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
- 3) Bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), temuan-temuan dari penelitian ini dapat dirujuk untuk meningkatkan kualitas kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), sehingga materi yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami dan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berkembang secara optimal.
- 4) Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagai motivasi agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan kehidupan sehari-hari.
- 5) Bagi peneliti, sebagai pengalaman dan menambah pengetahuan dalam bidang penelitian ini. Dengan melakukan penelitian ini akan mengetahui secara langsung bagaimana Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Gunung Kokosan, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.